

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah gabungan antara Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) Provinsi Jawa Timur, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka digabungkanlah dua institusi tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Kabag Tata Usaha
4. Sub Dinas Penyusunan Program
5. Sub Dinas TK / SD
6. Sub dinas DIKMENUM (Pendidikan Menengah Umum)
7. Sub Dinas DIKMENJUR (Pendidikan Menengah Kejuruan)
8. Sub Dinas PLB (Pendidikan Luar Biasa)
9. Sub Dinas PLS (Pendidikan Luar Sekolah)
10. Sub Dinas tenaga Kependidikan Pemerintah

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, struktur Dinas telah berganti menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, hal ini ditandai dengan Peraturan Daerah Nomor

9 Tahun 2009 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Komposisi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang TK /SD / PK
4. Kepala Bidang SMP /SMA
5. Kepala Bidang SMK /PT
6. Kepala Bidang PLS /PLB
7. Kepala Bidang TENDIK (Tenaga Kependidikan)

Lokasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, berada di Jalan Genteng Kali Nomor 33, Surabaya. Terletak di lantai 4 bagian Perencanaan. Tepatnya di Bagian Penyusunan Program.

2.2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

1. Visi : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah "Terwujudnya insan yang, cerdas, berakhlak, profesional, dan berbudaya". Visi yang dirumuskan dengan tujuan agar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat berperan aktif, antisipatif, inovatif, dan produktif sesuai dengan eksistensinya dalam kerangka pembangunan Jawa Timur, diterjemahkan menjadi sejumlah indikator visi sebagai berikut :

1. Insan yang cerdas adalah insan yang memiliki daya kapabilitas tinggi dalam merealisasikan kecerdasan spiritual (beriman dan takwa), kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan kinestetis. Kecerdasan spiritual tercermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam hal olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan

memperkuat keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, budi pekerti luhur, dan kepribadian unggul. Kecerdasan emosional tercermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam hal olah rasa untuk meningkatkan kualitas (a) sensitivitas dan apresiasi terhadap kehalusan dan keindahan seni dan budaya dan (b) kompetensi dalam mengekspresikannya. Kecerdasan sosial tercermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam realitas interaksi sosial. Kecerdasan intelektual tercermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam hal olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan sikap kritis, kreatif, dan imajinatif. Kecerdasan kinestetis tercermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam bidang olah raga untuk mewujudkan insan adiraga yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas.

2. Insan yang berakhlak adalah insan yang memiliki kapabilitas tinggi dalam merealisasikan pikiran dan tindakan positif dan menghindari pikiran dan tindakan negatif sesuai dengan norma agama, sosial, dan perundang-undangan/peraturan yang berlaku.
3. Insan yang profesional adalah insan yang memiliki kapabilitas tinggi dalam mengekspresikan kinerja dan produk kerja. Memahami dan melaksanakan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, mampu berkomunikasi secara efektif yang relevan dengan pengembangan bidang kerjanya.
4. Insan yang berbudaya adalah insan yang memiliki kapabilitas tinggi dalam interaksi dan adaptasi sosial, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur hasil

olah hati, olah pikir, olah rasa, olah batin, dan olah rohani yang terkandung dalam budaya bangsa.

5. Pada hakikatnya indikator visi ini sejalan dan merupakan keinginan untuk mewujudkan falsafah pembangunan Jawa Timur, yakni : Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo. Falsafah tersebut memberikan legitimasi terbentuknya insan yang berbudaya harus mampu mengatur perasaan diri sendiri sebelum berbagi rasa, bersemangat dan menyamakan persepsi dengan orang lain, sehingga timbul saling menghormati dan timbul rasa kasih manusiawi (silih asih dan silih asah) sebagai sendi terciptanya saling pengertian dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan untuk selanjutnya bersama-sama membangun bangsa ini (silih asuh).

2. Misi : Merupakan hal yang penting untuk mengarahkan operasionalisasi organisasi sehingga dapat terus eksis dan mengikuti irama perubahan zaman.

Perumusan misi dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Tugas pokok dan fungsi organisasi
2. Customers dan pihak-pihak yang berkepentingan
3. Permasalahan yang harus ditangani

Untuk merealisasikan visi tersebut di atas, misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Timur dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerataan pendidikan dengan meningkatkan angka partisipasi murni dan angka transisi dan menurunkan angka putus sekolah melalui jalur sekolah dan luar sekolah.

2. Membangun karakter peserta didik yang berlandaskan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kemandirian, kejujuran (anti korupsi kolusi dan nepotisme), peduli terhadap perubahan lingkungan dan memiliki empati terhadap kesenjangan sosial yang ada di sekelilingnya.
3. Mewujudkan kelangsungan program pemberian bantuan pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan menaikkan nilai rata-rata hasil evaluasi akhir pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
5. Meningkatkan peran serta pendidikan dalam pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
6. Meningkatkan jumlah lembaga pendidikan yang bertaraf nasional dan internasional.
7. Meningkatkan kualitas: tata kelola pendidikan, peran serta masyarakat terhadap pendidikan melalui manajemen mutu berbasis sekolah, pencitraan publik, dan daya saing.
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pendidikan baik formal maupun nonformal, termasuk pendidikan kesetaraan.
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pendidikan sehingga mampu memberikan kesempatan belajar kepada semua segmen masyarakat.
10. Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi mereka yang memiliki kendala geografis, fisik, tempat, dan waktu, dengan model pembelajaran alternatif.

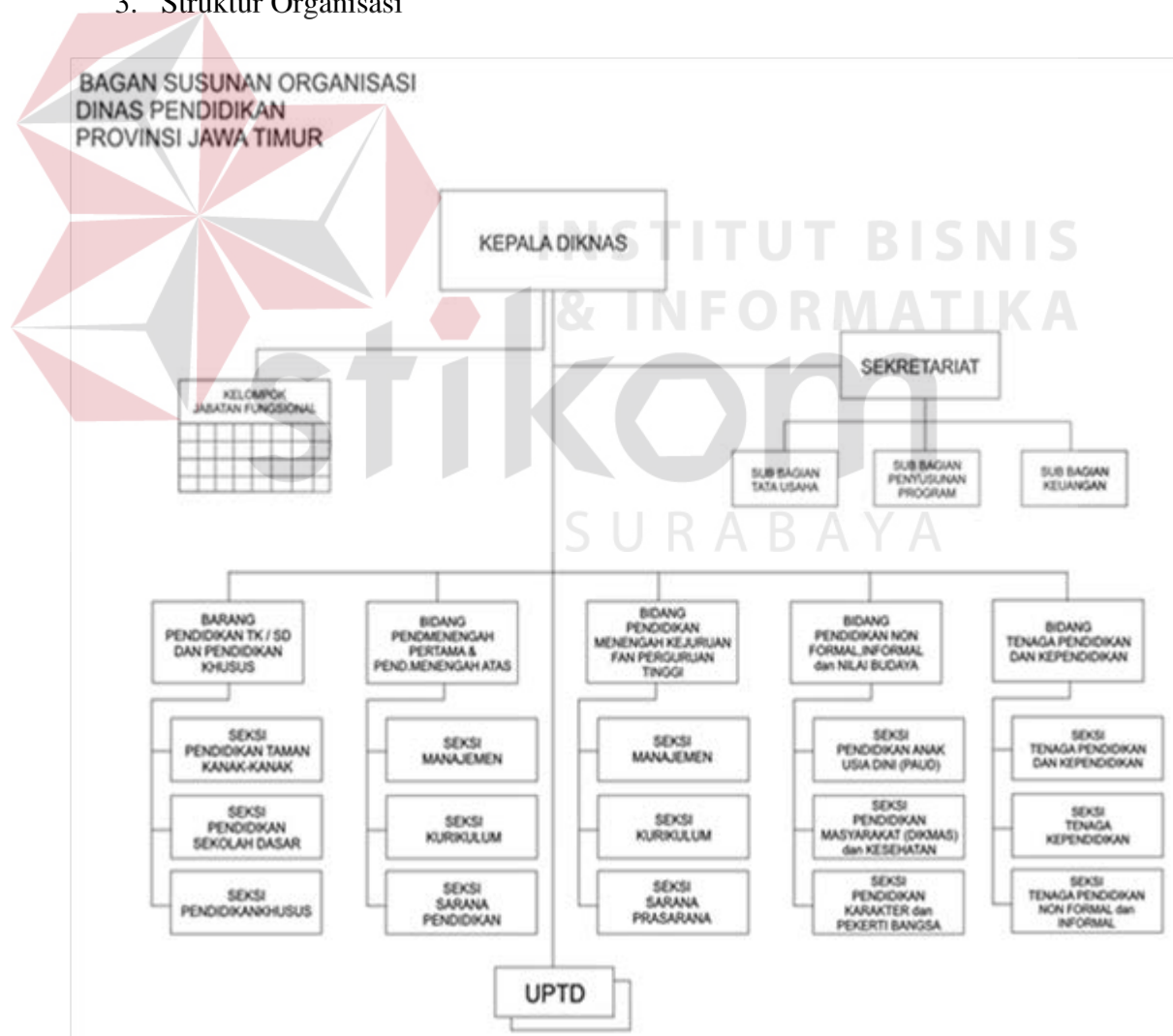
11. Mewujudkan masyarakat yang gemar belajar, bekerja, dan berusaha melalui pelaksanaan program utama Pendidikan Non Formal yang berbasis pada kebutuhan belajar masyarakat.
12. Meningkatkan peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
13. Memfasilitasi perencanaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah Jawa Timur.
14. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat mendukung perwujudan pendidik dan tenaga kependidikan profesional, produktif, berdedikasi tinggi, sejahtera, dan memiliki rasa aman dalam menjalankan profesinya.
15. Memfasilitasi pemerintah daerah, dewan pendidikan daerah, dan komite sekolah dalam penerapan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan baik formal maupun informal.
16. Menjalin kerja sama dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders), dalam pembinaan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik formal maupun informal.
17. Melaksanakan akuntabilitas dan pencitraan publik terhadap kinerja pembangunan pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan yang lengkap, andal dan dapat dipercaya.
18. Memfasilitasi pengembangan pendidikan berbasis keagamaan (as salafiyah, ahlu sunnah wal jama'ah sebagai institusi pendidikan dan lain-

lain) sehingga secara bertahap terjadi kesejajaran mutu dengan pendidikan umum.

19. Meningkatkan perluasan dan pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan seni budaya di sekolah dalam rangka pengembangan karakter dan budi pekerti bangsa.

20. Mewujudkan internalisasi nilai budaya kepada pelajar melalui kegiatan pertunjukan, festival, pameran, parade dan bentuk sajian seni budaya yang positif.

3. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas pendidikan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan dinas pendidikan. Kepala Dinas berwenang menanda tangani ijin bidang pendidikan yang tidak ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
2. Sekretaris Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
3. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisien dan efektifitas pengelolaan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus.
4. Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Bidang Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
5. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas

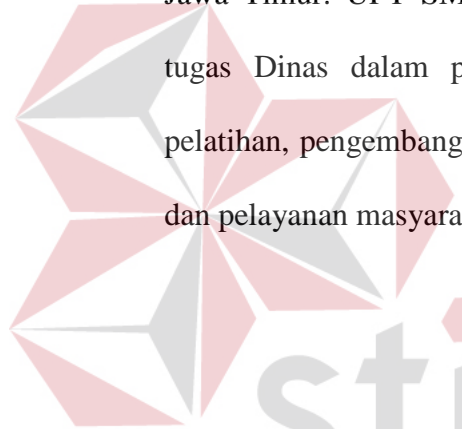
pengelolaan pendidikan menengah kejuruan serta pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.

6. Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Nilai Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan non formal, informal dan nilai Budaya.
7. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional pembinaan karier, peningkatan mutu dan profesionalisme, pelayanan serta perlindungan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
8. Sekretariat, bidang Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur : UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dan pelatihan teknik, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.
9. UPT Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan : UPT pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan, Ketatausahaan, dan Pelayanan Masyarakat.
10. UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian, UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya adalah UPT yang melaksanakan teknis operasional di lapangan. UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya dipimpin Kepala UPT Pendidikan Pengembangan Kesenian Taman Budaya yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pendidikan dan pengembangan kesenian taman budaya ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelestarian dan pengembangan kesenian serta peningkatan profesionalisme peserta didik dalam berkesenian.

11. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Timur: UPT SMANOR mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.



INSTITUT BISNIS
& INFORMATIKA
stikom
SURABAYA